

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab IV, mengenai pengaruh akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencegahan *fraud* dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Akuntansi sektor publik tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di kab. Malaka yang dapat dilihat dari nilai signifikan yang diperoleh sebesar $0,056 > 0,05$ t hitung $>$ dari t tabel hasil $= 1,981 < 2,036$ yang artinya akuntansi sektor public tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini disebabkan karena penerapan akuntansi sektor publik masih sangat rendah dalam mengatasi pencegahan *fraud*.
2. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* yang dapat dilihat dari nilai signifikan yang diperoleh sebesar $0,046 > 0,05$ dan nilai t hitung $2,076 > 2,036$ yang artinya dengan akuntabilitas kinerja instansi yang baik akan terjadi pencegahan *fraud* yang baik pula.

5.2. Implikasi Teoritis

Dalam bagian ini disajikan dasar teoritis yang digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah penelitian sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menerangkan gejala atau fenomena yang nampak pada hasil penelitian.

Berkaitan dengan penerapan akuntabilitas sektor publik, suatu satuan organisasi pada unit pemerintahan yang dianggap berdiri sendiri dalam hal ini unit pemerintahan yang bertindak atas nama sendiri karena kedudukannya terpisah dari stakeholdersnya dan dianggap sebagai pusat pertanggungjawaban, dengan media laporan keuangan yang dapat mencerminkan suatu pengelolaan. Laporan tersebut sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan pengusaha atas entitas laporan baik terhadap asset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi hal tersebut didasari asumsi bahwa laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban disusun atas dasar asumsi tertentu yaitu kemandirian, entitas, adanya kesinambungan entitas dan laporan terukur dalam satuan uang serta informasi tersebut harus mempunyai karakteristik relevan,

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. System akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Menurut Muchilisin (2018), *fraud* (kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak lain yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen X memberikan pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap variabel dependen Y. Dilihat dari hasil koefisien determinasi atau angka R Square dapat menjelaskan sebesar 0,201 berpengaruh terhadap variabel Y (pencegahan fraud) dan sisanya sebesar 20% dipengaruhi oleh penelitian lain yang tidak ikut sertakan dalam penelitian ini.

5.3. Implikasi Terapan

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi bahan acuan bagi kantor Bupati Malaka.

1. Melalui penelitian ini penulis menyarankan bagi kantor Bupati Malaka yang belum memahami pentingnya pencegahan fraud agar tetap memperhatikan hal tersebut yang dimana sangat bermanfaat dalam membantu kantor Bupati Malaka agar terhindar dari kecurangan.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang sama dengan penelitian ini, sebaiknya melakukan penelitian terhadap objek yang lebih luas dengan memperbanyak sampel terhadap instansi-instansi yang ada Kabupaten Malaka.